

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP KETIMPANGAN REGIONAL  
ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI**

**SUMATERA SELATAN**



Oleh :

**WENY RIZKI ANGGRAINI**

**NIM : 01101002048**

**Ekonomi Pembangunan**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih**

**Gelar Sarjana Ekonomi**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2014**

S  
336.59816 07  
Wen  
P  
2014.

R 26385 / 26945.



**PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP KETIMPANGAN REGIONAL  
ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI**

**SUMATERA SELATAN**



Oleh :

**WENY RIZKI ANGGRAINI**

**NIM : 01101002048**

**Ekonomi Pembangunan**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih**

**Gelar Sarjana Ekonomi**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2014**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**  
**Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Regional Antar**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

Disusun oleh :

Nama : Weny Rizki Anggraini  
Nim : 01101002048  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian Konsentrasi : Keuangan Daerah  
Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

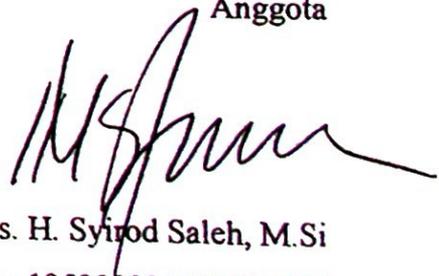
Tanggal Persetujuan

12 JUNI 2014

Dosen Pembimbing  
Ketua

  
Dra. Hj. Eka Rostartina, M.Si  
NIP : 195401031983032001

12 Juni 2014

Anggota  
  
Drs. H. Syirod Saleh, M.Si  
NIP : 195309021984031001

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

### ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP KETIMPANGAN REGIONAL ANTAR KABUPATEN/KOTA PROVINSI DI SUMATERA SELATAN

Disusun Oleh:

Nama Mahasiswa : Weny Rizki Anggraini  
NIM : 01101002048  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 19 Juni 2014 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Inderalaya, Juni 2014

Ketua



Dra. Hj. Eka Rostartina, M.Si  
195401031983032001

Anggota



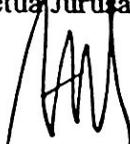
Drs. H. Syrod Saleh, M.Si  
195309021984031001

Anggota



Dr. Azwardi, S.E, M.Si  
196805181993031003

Mengetahui,  
Ketua Jurusan



Dr. Azwardi, S.E, M.Si  
196805181993031003

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Weny Rizki Anggraini  
NIM : 01101002048  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian : Keuangan Daerah  
Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Regional antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**.

Pembimbing

Ketua : Dra. Hj. Eka Rostartina, M.Si  
Anggota : Drs. H. Syirod Saleh, M.Si  
Tanggal Ujian : 19 Juni 2014

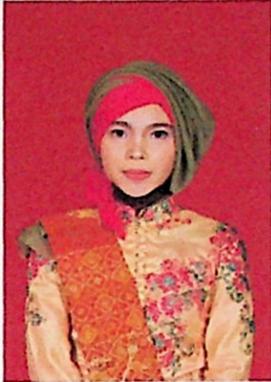
adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya. Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Indralaya, Juni 2014  
Pembuat Pernyataan,



Weny Rizki Anggraini  
NIM 01101002048

## RIWAYAT HIDUP



Nama Mahasiswa : Weny Rizki Anggraini  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat /Tanggal Lahir : Masat / 01 Oktober 1993  
Agama : Islam  
Status : Belum menikah  
Alamat Rumah (Orang Tua) : Prm. Griya Asri Blok  
G no 27 RT/RW :  
18/06. Palembang  
Alamat Email : wenyriz@gmail.com

### Pendidikan Formal :

Sekolah Dasar (1998-2004) : SD Negeri 214 Palembang  
SMP (2004-2007) : SMP Negeri 13 Palembang  
SMA (2007-2010) : SMA Negeri 2 Palembang

### Pendidikan Non Formal :

- Pendidikan Kursus Bahasa Inggris di LBPP LIA

### Pengalaman Organisasi :

- Pengurus Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) Sebagai Anggota divisi Humas (2011-2013).
- Pengurus EFFECS Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Sebagai Anggota Divisi Minat dan Bakat ( 2012-2013)
- Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa FE UNSRI (2013-2014)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Regional antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai dampak variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap ketimpangan regional tahun 2008-2012. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan
3. Ketua Jurusan
4. Sekretaris Jurusan
5. Para dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran
6. Orang tua

Inderalaya, Juni 2014

Weny Rizki Anggraini

## ABSTRAK

### PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP KETIMPANGAN REGIONAL ANTAR KABUPATEN/KOTA PROVINSI DI SUMATERA SELATAN

Oleh:

Weny Rizki Anggraini

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan regional antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat ketimpangan regional di masing-masing kabupaten/kota Sumatera Selatan. Ketimpangan regional dihitung dengan menggunakan rumus yang biasa disebut Indeks Williamson. Sedangkan variabel independennya adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Data yang digunakan adalah data panel, yaitu periode 2008-2012 dari lima belas kabupaten/kota di seluruh daerah Provinsi Sumatera Selatan. Data yang diperlukan berupa data sekunder. Untuk menganalisis penulis menggunakan metode regresi data panel, yaitu Model *Fixed Effect*. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara DAU terhadap ketimpangan regional sebesar 9,27, artinya jika DAU meningkat maka ketimpangan regional juga meningkat. Terdapat hubungan positif antara DBH terhadap ketimpangan regional sebesar 4,37, artinya jika DBH meningkat maka ketimpangan regional juga akan meningkat. Kemudian, DAK memiliki hubungan negatif terhadap ketimpangan regional sebesar 1,43, artinya jika DAK meningkat maka ketimpangan regional akan menurun.

Kata Kunci: *ketimpangan regional, DAU, DAK, DBH.*

## ABSTRACT

### THE INFLUENCE OF BALANCING FUNDS ON THE REGIONAL DISCREPANCY OF AND AMONG CITY GOVERNMENTS/COUNTIES IN SOUTH SUMATRA

By

Wendy Rizki Anggraini; Dra. H. Eka Rastartina, M. Si.; Drs. H. Syirad Saleh, M. Si.

This research is aimed at identifying the influence of balancing funds on the regional discrepancy of and among 15 city governments and counties in South Sumatra Province. The dependent variable is the regional discrepancy in the province whereas the independent ones are allotted public funds (DAU), special funds (DAK), and sharing funds (DBH). The data were taken from panel reports of 2008 – 2012 from each city government or county. This research used Williamson Index and panel regression analysis, that is, Fixed Effect Model. The research results show that there is a positive influence of DAU on the regional discrepancy as indicated by the value of 9.27. This also applies to DBD as indicated by the value of 4.37 meaning that if DAU or DBH increases then the discrepancy will also increase. Conversely, DAK shows a negative influence as indicated by the value of 1.43 meaning that if DAK increases then the discrepancy will decrease.

Keywords: regional discrepancy, DAU, ADK, DBH



**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
2.1 Landasan Teori	
2.1.1. Teori Transfer .....	13
2.1.2. Konsep Ketimpangan .....	30
2.1.3. Tipologi Perekonomian Regional .....	34
2.2. Penelitian Terdahulu .....	37
2.3. Kerangka Pemikiran .....	42
2.5 Hipotesis .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	44
3.1. Ruang Lingkup Penelitian .....	44

3.2. Jenis dan Sumber Data .....	45
3.3. Teknik Analisis .....	45
3.3.1. Analisis Tipologi Klassen .....	44
3.3.2. Analisis Ketimpangan Ekonomi .....	47
3.3.3. Analisis Regresi Data Panel.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
4.1. Gambaran Umum .....	59
4.1.1. Ketimpangan Regional Provinsi Sumatera Selatan .....	55
4.1.2. Tipologi Regional Provinsi Sumatera Selatan .....	65
4.1.3. Perkembangan Dana Perimbangan Provinsi Sumatera Selatan .....	67
4.2. Hasil Penelitian .....	70
4.2.1. Estimasi Model Regresi Data Panel .....	70
4.2.2. Estimasi Regresi Data Panel dengan <i>Fixed Effect</i> .....	72
4.2.3. Uji Statistik .....	76
4.2.4. Uji Asumsi Klasik .....	79
4.3. Pembahasan .....	81
4.3.1. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Ketimpangan Regional antar Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan .....	81
4.3.2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Ketimpangan Regional antar Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan .....	82
4.3.3. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Ketimpangan Regional antar Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan .....	83
4.3.4. Analisis Individual Ketimpangan Regional Masing-masing Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.....	84

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	91
5.1. Kesimpulan .....	91
5.2. Saran .....	93
DAFTAR PUSTAKA .....	94
LAMPIRAN .....	95

## DAFTAR TABEL

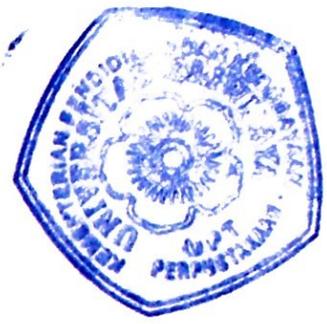
Tabel 1.1. Perkembangan Jumlah Penduduk dan PDRB ADHK di Sumatera Selatan Tahun 2007 dan 2011.....	3
Tabel 1.2. Dana Perimbangan Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 dan 2011.....	9
Tabel 3.1. Tabel Pembagian Tipologi Klassen.....	46
Tabel 4.1. Tabel Indeks Williamson Kab/Kot Provinsi Sumsel.....	60
Tabel 4.2. Standar Deviasi Ketimpangan Regional Kabupaten/kota .....	63
Tabel 4.3. Klasifikasi Tipologi Klassen Kab/Kot Provinsi Sumatera Selatan	65
Tabel 4.4. Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	68
Tabel 4.5. Hasil Uji Chow.....	71
Tabel 4.6. Hasil Uji Hausman .....	72
Tabel 4.7. Hasil Regresi Model Ketimpangan Regional Fixed Effect.....	73
Tabel 4.8. Tabel Intersep Masing-masing Kabupaten/Kota Sumsel.....	75
Tabel 4.9. Koefisien Determinasi.....	75
Tabel 4.10. Hasil Uji Multikolonieritas.....	79

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kurva Matching Grants.....	20
Gambar 2.2. Kurva Non-Matching Grants .....	21
Gambar 2.3. Kurva Closed Ended Matching Grants.....	22
Gambar 2.4. Kurva Kuznet.....	33
Gambar 2.. Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	41
Gambar 4.1. Ketimpangan Horizontal Kabupaten/Kota Sumatera Selatan.....	64

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 PDRB ADHK SUMSEL 2008-2012 .....	97
Lampiran 2 JUMLAH PENDUDUK SUMSEL 2008-2012 .....	98
Lampiran 3 PENDAPATAN PERKAPITA SUMSEL 2008-2012 .....	99
Lampiran 4 PERHITUNGAN INDEKS WILIAMSON 2008 .....	100
Lampiran 5 PERHITUNGAN INDEKS WILIAMSON 2009 .....	101
Lampiran 6 PERHITUNGAN INDEKS WILIAMSON 2010 .....	102
Lampiran 7 PERHITUNGAN INDEKS WILIAMSON 2011 .....	103
Lampiran 8 PERHITUNGAN INDEKS WILIAMSON 2012 .....	104
Lampiran 9 Hasil Estimasi Pooled Last Square.....	105
Lampiran 10 Hasil Estimasi Fixed Effect dengan Intersep .....	106
Lampiran 11 Hasil Uji Chow Test .....	107
Lampiran 12 Hasil Estimasi Random Effect .....	108
Lampiran 13 Hasil Uji Hausman.....	109
Lampiran 14 Hasil Uji Multikolonierisme.....	110
Lampiran 15. Standar Deviasi Ketimpangan.....	110
Lampiran 16. Data Operasional.....	111



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Provinsi Sumatera Selatan memiliki 11 Kabupaten dan 4 Kota yang merupakan daerah otonom dimana setiap daerah memiliki karakteristik sosial budaya, demografi wilayah, dan struktur perekonomian masing-masing yang berbeda satu sama lain, yang tentunya akan berpengaruh kepada tingkat kemajuan pembangunan masing-masing daerah dan akhirnya menyebabkan ketimpangan pembangunan. Kondisi geografis, budaya, dan tipologi ekonomi yang sangat bervariasi antar-daerah menuntut adanya strategi kebijakan yang berbeda-beda pula agar mampu mendorong akselerasi pembangunan daerah. Selaras dengan hal tersebut, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah pula membuka kesempatan bagi daerah untuk mengarahkan kebijakan publiknya menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi unggulan daerah yang dimilikinya. Inovasi, kreatifitas, sensitifitas dan kejelian pemerintah daerah dalam meramu kebijakan akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah (Kemenkeu.go.id : 2013).

Tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor (Kuncoro, 2004). Menurut Safrizal (2010), ketimpangan pendapatan regional dapat didefinisikan sebagai perbedaan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap pembangunan baik antar daerah maupun antar sektor dikarenakan adanya potensi

sumber daya alam yang ada, kualitas sumber daya manusia dan kemajuan teknologi yang terdapat pada masing-masing daerah dapat menyebabkan adanya ketimpangan ekonomi negara.

PDRB adalah total nilai barang dan jasa yang di produksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun). Pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB dapat dihitung dengan dua cara, yaitu PDRB dengan minyak gas atau tanpa minyak gas. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dapat di hitung dengan menggunakan PDRB riil (harga konstan) atau nominal (harga berlaku). (Kuncoro, 2004).

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan cukup tinggi. Hal tersebut didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Sumatera Selatan. Dalam website resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan [www.sumselprov.go.id](http://www.sumselprov.go.id) , dikatakan bahwa sumber daya alam khususnya potensi energi primer yang terdapat di wilayah Sumatera Selatan merupakan daya tarik kuat bagi masuknya penanaman modal untuk meningkatkan perekonomian daerah. Hal ini didukung oleh letak Provinsi Sumatera Selatan diantara Pulau Jawa dan Singapura/Malaysia yang secara ekonomi sangat strategis. Potensi sumber daya energi Sumatera Selatan seperti minyak bumi, gas bumi, batubara dan panas bumi terdapatnya tersebar dan berlimpah merupakan modal dasar dalam mewujudkan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi khususnya melalui Pembangunan Ketenagalistrikan dan penyediaan energi bahan bakar dan industri ([Sumselprov.go.id](http://Sumselprov.go.id) : 2013).

Menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan (2000), ada beberapa faktor terjadinya fenomena ketimpangan di Sumatera Selatan, yaitu: i) ketimpangan ekonomi dalam rangka pemerataan pertumbuhan (produktivitas ekonomi); ii) ketimpangan infrastuktur dengan membandingkan jumlah fasilitas dan prasarana wilayah; iii) ketimpangan sosial yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan data PDRB.

Menurut Sianturi dan Miyasto (2011), pada hakekatnya, kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara sedang berkembang (NSB), tidak terkecuali di Indonesia. Karenanya, tidaklah mengherankan ketimpangan itu pastinya selalu ada, baik itu di negara miskin, negara sedang berkembang, bahkan negara maju sekalipun.

Konsep desentralisasi fiskal diharapkan dapat memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik dan berdaya saing tinggi serta dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan secara vertikal maupun horizontal (Simanjuntak, 2002). Namun dalam prakteknya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal selama pemerintahan orde baru belum dapat mengurangi ketimpangan vertikal dan horisontal, yang ditunjukkan dengan tingginya derajat sentralisasi fiskal dan besarnya ketimpangan antar daerah dan wilayah (Uppal dan Suparmoko, 1986; Sjahfrizal, 1997).

Pelaksanaan desentralisasi di Sumatera Selatan belum dapat dikatakan ideal. Hal tersebut dikarenakan ketimpangan antar daerah di Provinsi Sumatera Selatan masih cukup terasa, hal tersebut dapat dilihat dari gambaran PDRB masing-masing Kabupaten/Kota. Dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat sebagai wujud desentralisasi fiskal, belum dapat memberikan dampak yang optimal sebagai salah satu penekan tingkat ketimpangan antardaerah. Ketimpangan antar daerah memang tidak hanya ditentukan oleh dana perimbangan yang didapat oleh masing-masing daerah saja. Banyak faktor lain yang mempengaruhi tingkat ketimpangan antar daerah seperti kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran, dan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya alam.

Tingkat ketimpangan antar wilayah di Sumatera Selatan dapat dilihat dari jumlah penduduk per kapita, PDRB per kabupaten/kota dan provinsi, melalui perhitungan Indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Jika ketimpangan Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antara daerah merata. Jika ketimpangan Williamson mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antara daerah tidak merata.

Berikut ini tabel yang menggambarkan PDRB Provinsi Sumatera Selatan:

Tabel 1.1. Perkembangan Jumlah Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto

ADHK 2000 di Sumatera Selatan tahun 2007 dan 2011

Kabupaten/Kota	2007		2011	
	Jumlah		Jumlah	
	Penduduk	PDRB	Penduduk	PDRB
1. Ogan Komering Ulu	262.283	2.468.624	334.295	3.011.989
2. Ogan Komering Ilir	685.296	1.491.622	742.374	1.865.973
3. Muara Enim	653.304	7.300.405	731.410	8.950.149
4. Lahat	341.547	2.292.062	374.505	2.891.696
5. Musi Rawas	492.437	3.127.521	535.614	3.863.963
6. Musi Banyuasin	497.864	10.541.003	580.489	11.856.897
7. Banyuasin	778.627	3.800.705	762.482	4.564.201
8. OKU Selatan	326.162	1.077.964	320.290	1.367.342
9. OKU Timur	571.557	2.001.672	619.460	2.496.082
10. Ogan Ilir	372.431	1.492.710	387.205	1.865.973
11. Empat Lawang	211.546	818.291	222.735	1.016.597
12. Palembang	1.394.954	14.998.693	1.481.814	19.820.351
13. Prabumulih	134.686	1.208.219	166.960	1.471.631
14. Pagar Alam	116.102	538.181	127.706	641.528
15. Lubuk Linggau	181.068	940.437	206.086	1.209.353
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>7.019.864</b>	<b>54.098.109</b>	<b>7.593.425</b>	<b>66.893.725</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat bahwa kinerja keuangan Provinsi Sumatera Selatan secara umum terus meningkat dari tahun ke tahun. Daerah yang memiliki nilai PDRB paling tinggi adalah Kota Palembang dengan total PDRB pada tahun 2007 sebesar 14.998.693, dan semakin meningkat pada tahun

2011 sebesar 19.820.531. Sedangkan daerah yang memiliki nilai PDRB paling rendah adalah Kota Pagar Alam dengan total PDRB pada tahun 2002 sebesar 538.181, dan meningkat hingga tahun 2011 sebesar 641.528. secara umum, jumlah penduduk pada masing-masing Kabupaten/kota juga terus meningkat. Tabel perkembangan PDRB dan jumlah penduduk diatas, dapat menunjukkan gambaran mengenai ketimpangan antar Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Untuk menekan tingkat ketimpangan yang terjadi, pemerintah memerlukan dana transfer dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah. Kondisi ketimpangan regional antar Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, dapat dijelaskan dengan grafik dibawah ini :

Menurut Hendrik dan Nurdin (2008), ketimpangan pendapatan masyarakat meningkat disebabkan akibat desain hubungan fiskal antara pusat dan daerah masih menempatkan pembiayaan pembangunan daerah dalam posisi tergantung dengan subsidi dari pusat. Begitu pula yang dikatakan oleh Wardhana (2013), Pemerintah Pusat berdasarkan UU No 33/2004 memberikan dana transfer kepada pemerintah daerah. Dana transfer pusat tersebut digunakan sebagai perimbangan keuangan daerah. Dana transfer yang diberikan pemerintah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) yang difungsikan sebagai stimulus fiskal bagi daerah. Dana transfer pusat diharapkan akan memberikan peningkatan pembangunan bagi daerah. Namun dana transfer pusat tersebut belum memberikan penurunan ketimpangan pendapatan antar daerah. Dana transfer pusat ini setidaknya dapat menutupi kebutuhan daerah.

Ketimpangan pendapatan setiap daerah akan terjadi tetapi pemerintah akan memikirkan bagaimana ketimpangan pendapatan daerah dapat diturunkan.

Berbagai implementasi otonomi daerah yang sudah dilakukan, masih menimbulkan kebingungan masyarakat bahkan para pejabat. Efek otonomi yang melibatkan desentralisasi fiskal dengan tujuan menciptakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah masih sering menjadi topik yang hangat terutama mengenai Dana Alokasi Umum. Konsep desentralisasi fiskal ini mengundang pro dan kontra, yang mendukung konsep desentralisasi fiskal ini beranggapan bahwa desentralisasi fiskal adalah sebuah kebijakan yang tepat bagi pertumbuhan regional. Kebijakan ini akan cenderung menyebabkan dekatnya jarak antara pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan para stakeholder-nya sehingga kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan Stake holder (masyarakat). Sebaliknya bagi yang kontra desentralisasi fiskal merupakan syarat bagi terciptanya pemerataan tingkat ekonomi antar daerah serta pengelolaan keuangan yang profesional oleh perangkat administratif pusat daripada daerah (Suhadak dan Trilaksono, 2006).

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Implikasi langsung atas implementasi otonomi daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar.

Menurut Kuncoro (2007) bahwa PAD (Pendapatan Asli Daerah) hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20% dan peningkatan alokasi transfer diikuti dengan pertumbuhan belanja yang lebih tinggi. Pada saat transfer dana dari pemerintah pusat menurun diikuti juga oleh penurunan belanja daerah yang melebihi penurunan PAD. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi sekaligus akan mengakibatkan suatu ketimpangan di daerah tersebut.

Ristriardani (2011), dalam penelitiannya mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap pendapatan perkapita dan disparitas pendapatan antar daerah di Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan bahwa bantuan transfer dana kepada Pemerintah Daerah berupa dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Salah satu alasan adanya pemberian dana perimbangan ditujukan untuk membantu daerah dalam membiayai kewenangannya.

Dilihat dari kontribusi dana perimbangan terhadap kemampuan pembiayaan di daerah, terlihat bahwa dana perimbangan ini masih merupakan sumber dana yang sangat penting bagi daerah. Secara rata-rata, sumbangan kepada total penerimaan daerah mencapai 80 persen. Dengan demikian, pembiayaan daerah dalam rangkadesentralisasi fiskal masih sangat tergantung pada dana dari pusat, kendati usaha ke arah peningkatan PAD sudah dilakukan . Kontribusi PAD terhadap total penerimaan pemerintah daerah secara rata-rata hanya sebesar 11 persen (Riyanto, dikutip dalam Ristriardani, 2011). Berikut

adalah gambaran alokasi dana perimbangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan periode 2012 :

Tabel 1.2. Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 dan 2011

No	Kabupaten/Kota	2007			2011		
		DBH	DAU	DAK	DBH	DAU	DAK
1.	Kab. Lahat	199.782.000.000	370.429.000.000	41.832.000.000	235.979	442.109	48.850
2.	Kab. Musi Banyuasin	1.041.716.430.000	190.145.000.000	49.136.000.000	1.363.611	294.985	61.809
3.	Kab. Musi Rawas	212.960.000.000	410.612.000.000	53.297.000.000	485.697	467.450	62.011
4.	Kab. Muara Enim	211.924.929.256	358.566.000.000	10.623.000.000	458.447	463.445	41.741
5.	Kab. Ogan Komering Ilir	613.453.482.962	-	-	161.274	670.310	66.440
6.	Kab. Ogan Komering Ulu	-	296.150.000.000	39.014.000.000	204.658	375.427	8.177
7.	Kota Palembang	127.215.096.920	659.611.000.000	8.387.000.000	243.247	787.613	47.679
8.	Kota Prabumulih	89.875.283.000	161.515.000.000	20.192.000.000	170.494	247.679	22.567
9.	Kota Pagar Alam	94.776.164.500	163.339.000.000	24.230.000.000	164.216	230.466	21.947
10.	Kota Lubuk Linggau	25.852.760.000	191.501.000.000	22.828.000.000	151.582	267.775	26.693
11.	Kab. Banyuasin	147.822.756.000	384.980.000.000	41.178.000.000	208.460	539.462	78.771
12.	Kab. Ogan Ilir	186.514.978.360	260.428.000.000	36.088.000.000	234.087	363.062	41.698
13.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	159.054.225.680	326.475.000.000	37.210.000.000	150.904	456.813	56.735
14.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	58.970.033.948	224.740.000.000	30.640.000.000	117.527	338.641	45.108
15.	Kab. Empat Lawang	*	*	*	196.082	244.628	41.634

Sumber : <http://www.djpk.depkeu.go.id/itd/>

Pada tabel di atas dapat kita lihat alokasi dana perimbangan, DAU, DAK, dan DBH Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil adalah pos yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan pos Dana Alokasi Khusus. DAU memiliki kecenderungan meningkat tiap tahunnya, ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah masih membutuhkan

perimbangan keuangan berupa transfer DAU, DAK, dan DBH untuk dapat melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Kabupaten yang mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil terbesar adalah Kabupaten Musi Banyuasin dengan total pada tahun 2011 sebesar 1.363.611 juta rupiah. Alokasi yang besar tersebut dikarenakan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin. Penerima Dana Alokasi Umum terbesar adalah Kota Palembang dengan total sebesar 787.613 juta rupiah. Penerima Dana Alokasi Khusus terbesar adalah Kabupaten Banyuasin sebesar 78.771 juta rupiah. Dana yang besar tersebut seharusnya dapat menekan tingkat ketimpangan antar daerah yang terjadi di Kabupaten/kota Sumatera Selatan, namun ketimpangan masih cukup tinggi. Dari uraian diatas, isu mengenai dana perimbangan dan ketimpangan regional di Provinsi Sumatera Selatan menarik untuk diteliti lebih jauh. Judul penelitian yang akan ditulis adalah Analisis Pengaruh Alokasi Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Ekonomi Regional Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

## **1.2. PERUMUSAN MASALAH**

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar Dana Alokasi Umum (DAU) dapat mempengaruhi ketimpangan regional di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Seberapa besar Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat mempengaruhi ketimpangan regional di Provinsi Sumatera Selatan.

3. Seberapa besar Dana Bagi Hasil (DBH) dapat mempengaruhi ketimpangan regional di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Seberapa besar DAU, DAK, dan DBH (Dana Perimbangan) bersama-sama dapat mempengaruhi ketimpangan regional di Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar DAU dapat mempengaruhi ketimpangan regional di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar DAK dapat mempengaruhi ketimpangan regional di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui seberapa besar DBH dapat mempengaruhi ketimpangan regional di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui seberapa besar DAU, DAK, dan DBH (Dana Perimbangan) bersama-sama dapat mempengaruhi ketimpangan regional di Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

#### **a. Manfaat Operasional**

Penelitian ini dilakukan sebagai masukan dan menjadi sumber informasi untuk semua pihak yang berkepentingan dan yang akan melanjutkan penelitian lebih lanjut di bidang ekonomi Keuangan Daerah.

b. Manfaat Akademik

Penelitian ini ditujukan bagi kalangan akademisi, yang dapat menambah dan memperkaya bahan kajian teori untuk pengembangan penelitian berikutnya, sehingga dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh peneliti berikutnya.

c. Manfaat Teknis

Mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya untuk mendukung analisis pada penulisan makalah dan lain sebagainya.

## Daftar Pustaka

- Ariyanto, 2002. *Studi Transfer Pemerintah dalam Era Desentralisasi di Indonesia Kasus Dana Perimbangan*.
- Asngari, Imam (2008). *Modul Teori dan Praktikum Ekonometrika Eviews dan SPSS*. Inderalaya : Laboratorium Komputer-FE Unsri.
- Bahl, Roy. 2000. "China: Evaluating The Impact of Intergovernmental Fiscal Reform in Fiscal Decentralization in Developing Countries". *Cambridge University Press*. Vol X, No.13
- Baltagi, Badi H. 2005. *Econometric Analysis of Panel Dara*. 3rd ed. John Wiley & Sons Ltd, Chichester.
- Bird, Richard (2002). *Intergovernmental Fiscal Transfers: International Lessons for Developing Countries*". Rotman School of Management. University of Toronto, 105 St George Street. Canada.
- Boadway & Shah (2008). "Public Sector Governance and Accountability Series Intergovernmental Fiscal Transfer".
- BPS Provinsi Sumatera Selatan, "Sumsel dalam Angka", BPS Provinsi Sumatera Selatan berbagai edisi.
- Djpk.go.id. Realisasi Dana Keuangan Daerah. Berbagai Edisi.
- Fadilah, 2010. *Peranan Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Ketimpangan Kemampuan Keuangan pada Provinsi Sulawesi Selatan*
- Gujarati, Damodar. 2010. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Buku 1 Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat.
- Hartono, Budiantoro, 2008. Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. *Thesis*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hendrik & Nurdin, 2008. Ketimpangan Pendapatan Melebar. Diambil pada tanggal 10 Maret 2014 dari <http://www.Investorind-onesia.com>.
- Hidayat. 2004. *Desentralisasi: Tinjauan Literatur Tentang Konsep Dasar Pengalaman Negara Lain, dan Dinamika Kebijakan di Indonesia*, dalam Hari Susanto (penyunting), *Otonomi Daerah: Teori dan Kenyataan Empiris*. PPE-LIPI, Jakarta.
- Jhingan, 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, edisi 3. Jakarta. Rajawali Pers.

- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Katarina, 2013. *Pengaruh Alokasi Dana Perimbangan terhadap Ketimpangan Regional studi pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2003-2010*.
- Kemenkeu.go.id, 2013. *Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan*.
- Lazuardi, (2012). Analisis Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal & Horizontal di Jawa Timur 2007-2012. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya.
- Nachrowi, D dan Usman, hardius. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. LPFE UI
- Ningsih, Yasin, 2009. *Dampak Dana Alokasi Umum Terhadap Pemerataan Fiskal Kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat*. Majalah Ekonomi No 2 tahun XIX.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55, Tahun 2005. Tentang Dana Perimbangan.
- Ristriardani, 2011. *Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Perkapita Dan Disparitas Pendapatan antar Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan*. BPFUI, Jakarta.
- Ronauli, 2006. *Analisa Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Disparitas Pendapatan Daerah Pasca Penerapan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Diakses pada tanggal 12 Maret 2013 : <http://www.lontar.ui.ac.id>.
- Saragih, Juli Panglima, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi Daerah*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Sianturi, Miyasto, 2011. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Kabupupaten/kota Sumatera Utara)*. Semarang.
- Simanjuntak R A, 2001. "Berbagai Isu Penerimaan Daerah di Era Desentralisasi". Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Simanjuntak R A, Hidayanto D, 2002. "Dana Alokasi Umum di Masa Depan; Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah", LPEM-UI, Jakarta.
- Sjafrizal. 1997. "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat". *Prisma LP3ES*, No. 3/XXVI
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang : Baduouse Media.

- Suhadak dan Trilaksono, 2006. *Paradigma Baru: Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang. Bayumedia Publishing.
- Sugiono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Rosen, S . Harvey. 2010. *Public Finance*. Ninth Edition. McGraw Hill International Edition. Princeton University.
- Todaro, M.P, 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (H. Munandar, Trans. Edisi Ketujuh ed.)*. Jakarta : Erlangga.
- Tambunan, T. 2003. *Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Psat dan Daerah.
- Wardhana, 2013. *Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia*. Sosiohumaniora Volume 15.
- Zasriati, 2011. *Pengaruh Alokasi Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Ekonomi Regional di Provinsi Jambi*.